KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan berkat-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN TERA DISPENSER PENGUKUR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DENGAN SISTEM TEKNOLOGI DIGITAL DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) YANG TIDAK SESUAI DENGAN VOLUME SEBENARNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Di samping itu penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak **Prof. Dr. H.R Otje Salman Soemadiningrat, S.H**. selaku pembimbing I dan kepada yang terhormat Ibu **Febilita Wulansari, S.H** Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., M.S.Ak. selaku Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Komputer Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Moh. Tadjudin, M.A., selaku Pembantu Rektor II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan Universitas Komputer Indonesia.
4. Bapak Dr. Aelina Surya, Dra, selaku Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia
5. Bapak Prof. Dr. H.R Otje Salman Soemadiningrat, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
6. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia
7. Bapak Budi Fitriadi S, S.H., M.Hum., selaku staf dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
8. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku staf dosen sekaligus Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
9. Ibu Febilita Wulansari, S.H. selaku staf dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
10. Bapak Waridi, S.H selaku staf dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
11. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
12. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
13. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, adik dan kakaku, dan seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberi semangat dan do’a, terima kasih atas dorongan dan motivasi kepada penulis.

Terkhusus juga saya ucapkan terimakasih kepada kekasihku tercinta Claudya Fazha yang selama ini memberikan semangat, suppotr serta perhatian-perhatian yang begitu besar sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis terasa lebih ringan dan mudah.

Sahabat-sahabatku di asrama bogani Bandung, Ershat, Ip, Reza, Wayan, Andi, Yudis, Grande, Yeni, Gun, Arfan serta sahabat-sahabatku di kampus, Hardi, Fauzi, Windi, Nova, Rian, Lucky, Bom-bom, Sendy, Ari, Pia, andrea, yudha, bily dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga persahabatan kita tidak pernah akan berakhir walaupun kita nanti terpisah oleh kelulusan, juga kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis.

Tidak ada manusia yang sempurna, sehingga masukan untuk segala kekurangan dalam skripsi ini sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pembaca. Amin.

Bandung, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Pemikiran 6
F. Metode Penelitian 13

BAB II ASPEK-ASPEK HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SISTEM PENGUKUR BBM DI SPBU DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TEKNOLOGI DIGITAL

A. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen 17
B. Aspek Hukum Pengukur Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Digital..... 27

BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL KETIDAKSESUAIAN TERA DISPENSER PENGUKUR BBM DI SPBU DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TEKNOLOGI DIGITAL

A. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Kegiatan Penggunaan Pengukur BBM di SPBU Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Digital 34

B. Kendala-kendala Dalam Penggunaan Tera Pengukur BBM di SPBU Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Digital 38

BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PENGGUNAAN SISTEM PENGUKUR BBM DI SPBU DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TEKNOLOGI DIGITAL

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Ketidaksesuaian Pengukur BBM di SPBU Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakasi Elektronik 45

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Hal Ketidaksesuaian Tera Dispenser Pengukur BBM Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Digital di SPBU Yang Tidak Sesuai Dengan Volume Sebenarnya Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 77

B. Saran 79

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN TERA DISPENSER PENGUKUR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DENGAN SISTEM TEKNOLOGI DIGITAL DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) YANG TIDAK SESUAI DENGAN VOLUME SEBENARNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK

Oleh :

Harriyanto Thawil

31606010

Salah satu perkembangan teknologi adalah dengan adanya sistem teknologi digital. Kegiatan usaha di SPBU dengan menggunakan sistem teknologi digital adalah untuk mengukur secara otomatis penghitungan aliran BBM yang dikeluarkan dari mesin dispenser yang diperuntukkan kepada konsumen. Kelemahan dari mesin pengukur dengan menggunakan sistem teknologi digital dimungkinkan ketika tidak sesuainya penghitungan aliran yang keluar dari mesin yang diolah olah sistem teknologi digital. Persoalan timbul ketika berbicara mengenai hak dari konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen atas ketidaksesuaian tera dispenser pengukur BBM dengan sistem teknologi digital di SPBU yang tidak sesuai dengan volume sebenarnya berdasarkan Undang-undang Metrologi Legal Juncto Undang-undang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang dibutuhkan. Dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum, ditemukan kesimpulan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan dispenser pengukur sistem teknologi digital didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan upaya perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha dengan menggunakan dispenser pengukur sistem teknologi digital berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 1 angka 1 yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A LEGAL PROTECTION TO THE CUSTOMER ON UNSUITABILITY DISPENSER CALIBRATION OF FUEL GAUGE WITH DIGITAL TECHNOLOGY SYSTEM AT THE GAS STATION WITHOUT PROPER VOLUME IN DISCHARGE ACCORDING TO THE REGULATION NUMBER 2 OF 1981 ON LEGAL METROLOGI IN CORRELATION WITH REGULATION NUMBER 8 OF 1999 ON CUSTOMER PROTECTION

ABSTRACT

By :

Harriyanto Thawil

31606010

The technological development was result in digital system. Business activity of gas station with the digital system aimed to measure automatically fuel account by the dispenser to the customer. The drawback of digital engine is possible when the fuel discharge inappropriate in the calculation. The problem has arise when it talk about customer right that must be accomplished by business in application—how the legal protection to the customer on unsuitability dispenser calibration of fuel gauge with digital technology system at the gas station without proper volume in discharge according to the Metrology Legal Act, juncto Customer Protection Act, juncto Information and Electronic Transaction Act, and the dispute settlement between producer and customer in correlation with the Customer Protection Act.

The study arranged by normative juridical approach with analytical descriptive method in the specification. The law material research of primary, secondary and tertiary by literature and field study then proceed and analyze by qualitative juridical method.

According to the material process and analysis, it is found that business activity using of dispenser with digital technology system according to the Act No. 2 of 1981 on Legal Metrology and Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction. Meanwhile, customer protection effort in this case, according to the Act No. 8 of 1999 on Customer Protection as depicted on Article 1 paragraph 1 provides guarantee on legal certainty in protection and considering the right as described on Article 4 of Act No. 8 of 1999 on Customer Protection and Dispute Settlement according to the Article 45 of Act No. 8 of 1999 on Customer Protection.